

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dimulai sejak tahun 1964, pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hingga sekarang masih belum disahkan, oleh karena terjadi polemik di dalam pembahasannya. Dalam pembahasan RKUHP, tidak serta merta hanya sekedar mengubah teks/kalimat, redaksi, dan substansi pasal-pasal dari *Wetboek van Strafrecht* (KUHP). Namun, juga mengubah atau memperluas ide dasar terkait asas-asas di dalamnya. Pembahasan mengenai ide dasar terkait asas-asas dalam RKUHP, khususnya pada asas legalitas diperluas konsepsinya. Hal ini, agar peraturan undang-undang hukum pidana sesuai dengan kultur bangsa Indonesia, tidak hanya dari sisi kepastian hukum, namun juga pada sisi keadilan hukum. Akan tetapi, perluasan konsepsi asas legalitas RKUHP masih menjadi polemik.

Mengingat sumber utama hukum tertulis terkait dengan peraturan pidana, maka KUHP atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Wetboek van Strafrecht*) merupakan Titah Raja tertanggal 15 Oktober 1915 No. 33 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.¹

Segala perbuatan pidana diatur komprehensif di dalam KUHP, maka dalam praktiknya KUHP dipakai sebagai tolak ukur untuk penjatuhan sanksi berupa pidana. Hal yang mendasari penetapan perbuatan pidana serta penjatuhan sanksinya berasal dari asas legalitas, yang termuat dalam pasal 1

¹ Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Cetakan Ketiga, Malang, hlm. 28.

ayat (1) KUHP. Artinya, bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana atau bukan, harus ada peraturan tertulis yang menentukan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Namun, konsepsi tersebut bertolak belakang dengan sistem hukum *living law*, biasa dikenal dengan hukum adat. Di dalam sistem hukum adat, tidak ditegaskan peraturan-peraturan itu secara tertulis, namun diwujudkan dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat perbedaan secara konseptual maupun implementasinya. Akan tetapi, implikasi dari kedua sistem hukum tersebut tidak jauh berbeda, sebab apa yang dinamakan sebagai hukum adalah untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Nampaknya konsepsi di dalam asas legalitas yang ada pada pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan cerminan dari hukum sebagai undang-undang, sebab apa yang dimaksud oleh pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut ialah segala perbuatan harus dinyatakan sebagai perbuatan pidana menurut ketentuan yang sudah ada. Hal ini menimbulkan pemahaman yang salah, konsep asas legalitas KUHP seolah tidak memberi ruang kepada hukum tidak tertulis.

Namun, pembahasan RKUHP yang kian lama telah memperluas konsepsi asas legalitas hukum pidana. Hal ini termuat dalam Pasal 2 RKUHP versi 28 Mei 2018. Isi dari pasal 2 RKUHP ini berbunyi, “*ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*”

Apabila dicermati lebih mendalam, maka masing-masing konsep asas legalitas KUHP dengan konsep asas legalitas RKUHP tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Ukuran tersebut dilihat dari segi praktisnya dalam rangka penegakan hukum pidana, sebab tujuan daripada penjatuhan pidana sendiri yakni menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta keadilan dan kepastian hukum.

Dalam seminar Nasional “Menyikapi Pembahasan RKUHP” yang digelar oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi bekerja sama dengan FH UNPAD Bandung, mantan Hakim Agung, Prof. Komariah E. Sapardjaja berpendapat bahwa :²

“Ketentuan Pasal 2 ayat (1) RKUHP bertolak belakang dengan Pasal 1 ayat (1) RKUHP (koreksi penulis, konsep Pasal 1 ayat (1) RKUHP sama dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP), sebab dasar pemikiran Pasal 1 ayat (1) RKUHP adalah undang-undang. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) RKUHP justru pemikiran dasarnya adalah hukum tidak tertulis, menurut beliau ini berbenturan dengan Asas Legalitas, implementasi tindak pidana yang berlandaskan kepada *the Living Law* lebih ditujukan kepada Hakim untuk mengaturnya dari hukum tertulis.”

Mengenai polemik yang terus berlangsung pada Pasal 2 ayat (1) RKUHP, yang merupakan perluasan konsep asas legalitas, menurut Anggara Suwahju (Direktur Eksekutif ICJR) yang diwawancarai langsung oleh Hukumonline, menyatakan bahwa :³

“Pemerintah masih menggunakan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat yang multitafsir. Selain itu, jika kewenangan untuk memberikan penetapan terhadap perkara-perkara delik adat nantinya akan diberikan kepada Pengadilan Negeri, maka beban penanganan perkara hakim akan semakin meningkat. Selanjutnya, RKUHP membuka peluang polisi dan jaksa mencampuri masalah adat. RKUHP

² Mohammad Maulana Kusumawardhana, *Asas Legalitas Dikesampingkan oleh Living Law dalam RKUHP*, m.hukumonline.com, diakses tanggal 29 November 2018.

³ Aida Mardatillah, *Aturan Hukum Adat Dalam RKUHP Dinilai Masih Kabur*, dipublikasikan pada 9 Juni 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1b86b48b761/aturan-hukum-adat-dalam-rkuhp-dinilai-masih-kabur>, diakses 30 November 2018.

pada dasarnya memasukkan pengaturan yang tidak jelas mengenai pidana yang hidup dalam masyarakat. Pasal 679 ayat (1) RKUHP menyebutkan bahwa “*setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana*”. Meskipun pidana yang dimaksud berupa pemenuhan kewajiban adat, masuknya delik yang tidak memiliki pengaturan yang jelas perbuatan apa saja yang dilarang ini berarti membuka peluang aparat penegak hukum seperti Polisi dan Jaksa turut serta mencampuri masalah adat.”

Selanjutnya, dalam *pending issue* RKUHP (revisi 28 Mei 2018), yang telah disetujui oleh Tim Perumus pada 5 Februari 2018, Prof. Muladi memberikan penjelasan ditambah masukan terkait pada Pasal 2 ayat (1) RKUHP, yaitu sebagai berikut :⁴

“Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Dalam lapangan hukum pidana hal tersebut dikenal sebagai hukum pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana (delik) adat, perlu ditegaskan dalam Undang-Undang ini dan dikompilasi oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden yang berasal dari peraturan daerah masing-masing. Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai tindak pidana adat. Kompilasi tersebut juga harus berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.”

Namun, walaupun telah diberi batasan mengenai konsep hukum yang hidup dalam masyarakat oleh Prof. Muladi di atas, timbul pertanyaan baru mengenai penjelasan tersebut, apakah dapat dikatakan sebagai kodifikasi hukum pidana apabila hukum yang hidup dalam masyarakat berasal dari peraturan daerah yang dikompilasi oleh Peraturan Presiden ? Dan oleh sebab itu, hal ini kemungkinan akan terjadi dualisme hukum, antara RKUHP dengan Peraturan Presiden yang mengkompilasi hukum yang hidup dalam

⁴ *Pending Issue* 28 Mei 2018, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, <http://reformasikuhp.org/r-kuhp/>, diakses 30 November 2018.

masyarakat yang berasal dari Peraturan Daerah. Sehingga patut diketahui, tujuan dari pembentukan RKUHP sendiri yaitu mengkodifikasi serta unifikasi hukum pidana nasional.

Oleh karena itu, asas legalitas sebagai dasar terbentuknya suatu peraturan pidana menjadi *urgen* pembahasannya, mengingat hukum pidana memiliki sanksi yang sangat kejam, serta dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah *ultimum remedium* yakni sanksi pidana merupakan sanksi terakhir manakala sanksi-sanksi yang lain selain sanksi pidana tidak efisien diterapkan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa makna asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP dan asas legalitas Pasal 2 ayat (1) RKUHP dalam perspektif pembaharuan hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana konsep asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP dan asas legalitas Pasal 2 ayat (1) RKUHP dalam sistem hukum di Indonesia ?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penulisan yang ingin dituju adalah :

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan makna dan konsep asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP dan asas legalitas Pasal 2 ayat (1) RKUHP dalam sistem hukum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku pada asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP dan asas legalitas Pasal 2 ayat (1) RKUHP dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia.
- c. Untuk mewujudkan solusi atas polemik perluasan konsep asas legalitas.

D. Manfaat dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan tujuan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis berharap penulisan ini memberikan manfaat serta kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Penulisan

- a. Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran pada ilmu pengetahuan hukum pidana yang membahas tentang asas legalitas dalam sistem hukum di Indonesia.
- b. Penulisan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai terobosan pengetahuan dalam ilmu hukum terkait dengan asas legalitas hukum pidana.
- c. Penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi tugas dan syarat akademis untuk mendapat gelar Sarjana Strata 1 (S-1) di bidang ilmu hukum.

2. Kegunaan Penulisan

Penulis berharap dengan lahirnya tulisan ini, dapat menambah ilmu pengetahuan atau wawasan terkait urgensi asas legalitas serta implementasi dan implikasi hukumnya terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran terhadap para penegak hukum serta badan legislatif, khususnya polisi, hakim, jaksa, dan Dewan Perwakilan Rakyat serta akademisi dan mahasiswa hukum dalam upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sehingga dapat terjalin kerja sama dalam rangka menciptakan hukum, khususnya hukum pidana yang aspiratif sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

E. Metode Penulisan

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Yang melakukan metode analisis secara historis, deskriptif, dan eksperimental pada asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP dan asas legalitas Pasal 2 ayat (1) RKUHP, untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang objektif guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

b. Jenis Bahan Hukum

Dalam sistematika penulisan ini, penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum, skripsi hukum, artikel hukum, putusan pengadilan dan lain sebagainya.⁶

⁵ Ibid, Hlm. 141.

⁶ Ibid.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini berupa Kamus dan Ensiklopedia Hukum dan lain-lain.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta melalui penelusuran bahan internet dengan cara memperoleh bahan baik literatur maupun akses internet, artikel serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penulisan ini.

d. Analisa Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, selanjutnya penulis akan memulai analisa, dengan teknik analisis secara historis, deskriptif, dan eksperimental. Dalam penulisan ini, obyek analisis penulisan hukum adalah asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) RKUHP.

e. Sistematika Penulisan

Di dalam pembuatan Skripsi atau Tugas Akhir sangat diperlukan suatu sistematika penulisan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam menulis dan memudahkan pembaca untuk mengetahui atau mengerti, untuk memahami isi dari Tugas Akhir ini. Untuk memudahkan penulisan

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hlm. 13.

dan penjabaran penulisan, maka penulisan ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat alasan penentuan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, rujukan/tinjauan pustaka, metodologi penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang kajian-kajian teori hukum yang mendukung penulisan dalam menulis Skripsi atau Tugas Akhir ini terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu tentang Analisis Yuridis Komparatif Asas Legalitas KUHP Dengan Asas Legalitas RKUHP Penerapannya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan dipaparkan hasil penulisan yang merupakan sub-sub atas permasalahan yang diajukan dan penulis melakukan analisis atas hasil analisis yang diperoleh dari berbagai literatur, antara lain buku-buku hukum, jurnal atau penelitian terdahulu, artikel hukum, berita, dan peraturan perundang-undangan terkait berdasarkan pada teori atau kajian pustaka beserta pembahasannya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran, membahas mengenai hasil analisis penulisan berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan sebelumnya secara singkat dan padat.